

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. Hatta, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Aji, Indriyanto Seno, dkk., 2016, *Public Review terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ermansjah, Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahrojih. Ikhwan, dan Najih, Mokhammad, 2008, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, In-Trans, Malang.
- Fardigh, Mathias A., 2012, *Press Freedom and Corruption. "Good Governmet, The Relevant of Political Science"*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton.
- Ferguson, Gerry, 2018, *Global Corruption: Law, Theory, & Practice*, UVicSpace, University of Victoria.
- Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Harahap, Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryadi, Rohmat, 2009, *Chandra-Bibit, Membongkar Perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan*, Mizan Publika, Jakarta..
- Hatta, Moh., 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberta, Yogyakarta.

- Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Cita Intrans Selaras, Malang.
- Klitgaard, Robert, *et. al*, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Manning, Chris, 2000, *Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis*, Seng Lee Press, Singapore.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2017, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Depok.
- M. Manullang, 1977, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- N. Jayapalan, 2012, *Modern Government and Constitutions Volume II*, Atlantic Publishers and Distributors, Delhi.
- Pramurti, Angger Sigit dan Melyani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Quah, Jon, 2009, *Defying Institutional Failure: Learning from The Experiences of Anti-Corruption Agencies in Fourasian Countries*, Crime Law Soc Change.
- Santoso,Topo, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Puslitbang Kemenkumham RI, Jakarta.
- Setiyaji, Achmad, 2010, *Mereka Menuduh Saya*, Galang Press, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang, 1995, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir, 1998, *Apek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, cet. Kedua, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum Cetakan ke-3*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sujanto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukiyat, 2020, *Teori dan Praktik Pendidikan Antikorupsi*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandeen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Artikel Jurnal

Badjuri, Achmad, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Antikorupsi di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, Maret 2011.

Mas, Marwan, “Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Superbody Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 1, Januari 2013.

Meagher, Patrick, “Anti-Corruption Agencies: Rhetoric versus Reality”, *The Journal of Economic Policy Reform*, Vol. 8, No. 1, 2005.

Nugroho, Hibnu, “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jend. Soedirman*, Vol. 13, No. 3, 2013.

Utami, Andari Dwi, “Peran Alat Bukti Penyadapan Dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 2, Nomor 5, Edisi 1 Oktober 2020

Waluyo, Bambang, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2, Desember 2014.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Acvionita, Rindy, 2014, *Karakteristik dan Fungsi serta Sistem Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Puspitasari, Santi, 2016, *Pengaturan Kelembagaan Kelurahan dan Desa sebagai Local Government Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saraswati, Mega Puspita, 2018, *Implikasi Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Kekuasaan Kehakiman (Putusan Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2012-2016)*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Makalah

Atmasasmita, Romli, “Independensi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum”, *Karya Tulis Ilmiah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

BAPPENAS RI, “Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2009-2014”, *Makalah*.

KPK RI dan Kemenlu RI, “Komitmen Indonesia pada UNCAC dan G-20 ACWG 2012-2018”, *Makalah*, 2012.

DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah*, 2017.

Media Massa

Guzasiah, Muhammad Aulia, “Benalu Dewan Pengawas KPK”, *Tempo*, 12 November 2019.

Patricia, Sharon, “Kami Bukan Membela KPK, tapi Agenda Pemberantasan Korupsi”, *Kompas*, 17 September 2019.

Internet

ACCH, “Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 31 Mei 2020.

- Agung, “30 Pusat Kajian Antikorupsi Tolak RUU KPK”, <https://ugm.ac.id/id/berita/18427-30-pusat-kajian-antikorupsi-tolak-ruu-kpk>, diakses 29 Oktober 2020.
- Anggriawan, Ryan Dwiky, 2018, “Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK Versi ICW”, <https://nasional.tempo.co/read/1137510/catatan-19-dugaan-pelanggaran-kode-etik-internal-kpk-versi-icw>, diakses 4 Maret 2021.
- Bernie, Mohammad, “KPK Klaim Punya Salinan Buku Merah”, <https://tirto.id/kpk-klaim-punya-salinan-buku-merah-ekqy>, diakses pada 21 April 2020.
- BPJS, “Kode Etik BPJS Kesehatan”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a5aa2414827b8f62878c495a0a1c34a3.pdf>, diakses 29 Februari 2020.
- Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>, diakses pada 21 April 2020.
- DPR, “Ketua DPR Terima Laporan Tahunan KPK”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/131/t/KETUA+DPR+TERIMA+LAPORAN+TAHUNAN+KPK> diakses 4 Maret 2021.
- DPR, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20191021-094736-2809.pdf>, diakses 10 Januari 2021.
- Eko, “Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU KPK”, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25946/t/Rapat+Paripurna+DPR+Setujui+Revisi+UU+KPK>, diakses pada 21 April 2020.
- FAT, “Komite Etik KPK Dibentuk”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512b48a0e47a0/komite-etik-kpk-dibentuk/>, diakses 10 Januari 2021.
- Haryanto, Alexander, "Aksi Gejayan Memanggil di Jogja Serukan Mosi Tidak Percaya ke DPR", <https://tirto.id/aksi-gejayan-memanggil-di-jogja-serukan-mosi-tidak-percaya-ke-dpr-eiyG>, diakses 30 Oktober 2020.

- Hidayat, Rofiq, “Independensi Jadi Tantangan Pimpinan KPK Jilid V”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e001a5153b25/independensi-jadi-tantangan-pimpinan-kpk-jilid-v/>, diakses 17 Mei 2020.
- Huda, Mas Alamil, “Ini Prosedur Pembentukan Komite Etik KPK”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/09/njid78-ini-prosedur-pembentukan-komite-etik-kpk>, diakses 17 Maret 2021
- Huzaini, Dani Pratama, “20 Tahun Pasca Reformasi Pemberantasan Korupsi PR yang Belum Selesai”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0377627610b/20-tahun-pasca-reformasi--pemberantasan-korupsi-pr-yang-belum-selesai?page=2/>, diakses pada 1 Juni 2020.
- ICJR, “Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana : Perma No 13 tahun 2016 dan Tantangannya”, <https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/>, diakses pada 31 Mei 2020.
- Ihsanudin, “Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/20/14545241/resmi-lima-tokoh-ini-jabat-dewan-pengawas-kpk>, diakses pada 20 Juni 2020.
- KPK, “Putusan Komite Etik untuk Terperiksa Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja”, https://www.kpk.go.id/images/pdf/pip/Petikan_Putusan_Komite_Etik_KPK_2013.pdf, diakses 10 Januari 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Modul Materi Tindak Pidana Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diakses 15 Februari 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-berisiko-melemahkan-di-ruu-kpk>, diakses 3 Maret 2021.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, “Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all>, diakses 2 Maret 2021.

- Munawwaroh, 2011, "Johan Budi Jelaskan Pertemuannya dengan Nazaruddin", <https://nasional.tempo.co/read/349493/johan-budi-jelaskan-pertemuannya-dengan-nazaruddin/full&view=ok>, diakses 18 Maret 2021.
- Putra, Antoni, "Tolak Revisi UU KPK", <http://www.koran-jakarta.com/tolak-revisi-uu-kpk/>, diakses 18 November 2020.
- Ramadhan, Fahmi, "DPR: Wewenang Penyadapan KPK Diatur Ulang Karena Ada Penyalahgunaan", <https://katadata.co.id/berita/2019/09/07/dpr-wewenang-penyadapan-kpk-diatur-ulang-karena-ada-penyalahgunaan>, diakses pada 21 April 2020.
- Setiawan, Riyan, "Fraksi Demokrat DPR RI Sepakat Revisi UU KPK, Tapi dengan Catatan", <https://tirto.id/fraksi-demokrat-dpr-ri-sepakat-revisi-uu-kpk-tapi-dengan-catatan-eiez>, diakses 2 Maret 2021.
- Setiawan, Riyan, "Demo Mahasiswa Tolak RUU Bermasalah, Tak Perlu Dituding Ditunggangi", <https://tirto.id/demo-mahasiswa-tolak-ruu-bermasalah-tak-perlu-dituding-ditunggangi-eiNb>, diakses 30 Oktober 2020.
- <https://www.phrases.org.uk/meanings/absolute-power-corrupts-absolutely.html>, diakses pada 1 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264)

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan KPK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

Peraturan KPK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan KPK Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Perjanjian dan Konvensi Internasional

United Nations Convention Against Corruption

Jakarta Statement on Principles for Anticorruption Agencies